

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia (*human trafficking*) sudah menjadi perhatian khusus sejak lama yang tidak hanya terjadi pada lingkup nasional akan tetapi juga internasional. Isu tersebut sudah dikategorikan sebagai kejahatan transnasional karena melibatkan kelompok atau jaringan yang merencanakan dan melakukan bisnis perdagangan manusia dengan melintasi batas negara. Menurut Protokol Palermo Pasal 3a bahwa perdagangan orang didefinisikan sebagai berikut:¹

“Perdagangan orang berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang, memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ”.

Berdasarkan definisi di atas, secara sederhana dapat dilihat bahwa perdagangan orang merupakan proses dipindahkannya seseorang secara ilegal melewati perbatasan dengan tujuan eksploitasi. Persoalan perdagangan orang terjadi di dalam konteks migrasi tenaga pekerja internasional yang terjadi di banyak negara di dunia. Tujuan migrasi tenaga pekerja, yaitu memperoleh pendapatan dengan bekerja di luar negeri untuk kepentingan ekonomi yang bersangkutan dan keluarganya, serta sekaligus

¹ UU RI (2009, Maret 5). UU RI nomor 14 tahun 2009 tentang pengesahan “*protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the united nations convention against transnational organized crime*”. Jakarta. April 25, 2019. <http://www.bpkp.go.id/public/upload/uu/2/26/14-09.pdf>

memberikan kontribusi bagi kemajuan sosial dan ekonomi baik bagi negara asal maupun negara tujuan.

Untuk mendapatkan akses pekerjaan, tenaga pekerja atau buruh migran (sebutan khas di Indonesia) dalam melakukan migrasi harus melalui berbagai proses. Pemerintah Indonesia memiliki upaya untuk menjamin dan melindungi proses migrasi tenaga pekerja baik di dalam maupun di luar negeri. Namun, upaya tersebut masih belum maksimal bila kita melihat masih banyak buruh migran mengalami beragam kerentanan dan menghadapi resiko serius selama menjalani proses migrasi untuk memperoleh pekerjaan. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) merupakan lembaga yang memiliki andil besar dalam proses migrasi para buruh migran. Lembaga tersebut menjadi sarana bagi para calon tenaga kerja untuk mendapatkan akses bekerja ke luar negeri. Namun, tidak sedikit PJTKI yang tidak memiliki badan hukum resmi atau ilegal. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik perdagangan manusia karena tidak melalui proses dokumentasi yang sah, sehingga dapat dikategorikan sebagai penyeludupan manusia dengan cara penipuan. Di samping itu, proses yang dilalui memungkinkan terjadi tindak pemaksaan dan kekerasan terhadap para calon migran, sehingga pada akhirnya tenaga kerja tersebut mengalami eksploitasi sejak dari proses persiapan migrasi sampai dengan selama mereka bekerja di luar negeri.

Secara lebih luas, pihak mana pun akan sangat sulit memastikan jumlah kasus perdagangan orang di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena masih banyak kasus yang belum terdeteksi oleh publikasi resmi berbagai lembaga. Di samping itu, setiap lembaga juga memiliki data tersendiri mengenai jumlah kasus perdagangan orang. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan mengenai laporan jumlah kasus yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga. Menurut Wharton (2010), persoalan ini seiring dengan pernyataan bahwa perhitungan statistik mengenai kasus perdagangan orang masih sangat tidak relevan, sehingga sangat sulit untuk mengetahui seberapa banyak orang yang benar-benar mengalami *human trafficking* (Nico, 2017, p. 35).²

² Niko, Nikodemus. (2018). Fenomena trafficking in person di wilayah perbatasan kalimantan barat. Jurnal Studi Gender dan Anak. Universitas Padjajaran

Dalam kaitan itu, Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan tentang perdagangan orang yang tertuang pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang ini bertujuan untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negara maupun antarnegara dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang sudah sedemikian rupa diatur, namun dalam hal pelaksanaan penegakkan hukum baik para aparat dan pemerintah masih belum secara serius mengimplementasikannya. Perlu adanya bantuan dari lembaga – lembaga di luar pemerintah, seperti LSM dan lembaga lain yang fokus menangani isu perdagangan orang. Di sisi lain, munculnya beragam modus pelaku untuk merekrut korban mengakibatkan perdagangan orang semakin sulit untuk dideteksi secara langsung.

Mitra Wacana Women Resource Center (WRC), sebagai sebuah lembaga non-profit yang bergerak di bidang penguatan masyarakat berkaitan dengan isu-isu perempuan mencoba melihat upaya di luar pemerintah yang diwujudkan melalui praktik-praktik pemberdayaan dalam komunitas. Mitra Wacana WRC berupaya untuk memberikan harapan kepada masyarakat dalam mendapatkan apa yang seharusnya diperoleh, seperti perlindungan dan pengetahuan melalui program-program yang diinisiasi. Hal ini tercermin melalui salah satu program yang telah terlaksana pada periode Oktober 2018 hingga Maret 2019, yaitu tentang diseminasi pengetahuan sebagai bentuk penguatan terhadap masyarakat. Program ini berjudul “Pencegahan Perdagangan Orang melalui Pendidikan Publik, Pengembangan Media dan Advokasi Kebijakan” yang memiliki target sasaran, yaitu masyarakat di 9 desa pada 3 kecamatan (Kokap, Sentolo dan Galur) di Kabupaten Kulonprogo, DIY.

Elemen masyarakat yang menjadi sasaran yaitu kelompok bentukan Mitra Wacana WRC yang bernama Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) dan Kelompok Media Desa. P3A tersebut beranggotakan perempuan dengan latar belakang seorang mantan buruh migran, sedangkan Kelompok Media Desa beranggotakan pemuda dan pemudi desa serta beberapa anggota dari P3A. Melalui program tersebut,

Mitra Wacana WRC mencoba untuk memberikan pengetahuan kepada mereka tentang bahaya dan pencegahan perdagangan orang agar dapat melahirkan sikap untuk mencegah perempuan lain menjadi korban serta memiliki kemampuan untuk melakukan advokasi di tingkat desa. Tujuan utama pembentukan program ini adalah untuk mengurangi potensi perdagangan orang di Kabupaten Kulonprogo.

Program yang diinisiasi oleh Mitra Wacana WRC ini menarik minat saya untuk menelitinya, namun bukan pada substansi materi program tetapi pada proses pengorganisasian yang dilakukan agar program tersebut berhasil. Program tersebut dapat terlaksana secara sistematis dan dapat memberikan hasil yang sesuai harapan tentu karena adanya dukungan dari berbagai sumber daya. Sumber daya tersebut mencakup berbagai hal --baik manusia, pengetahuan maupun sarana prasarana-- yang dimiliki oleh Mitra Wacana WRC. Dalam dugaan saya, sumber daya tersebut kemudian diorganisir sedemikian rupa, sehingga tujuan program dapat diimplementasikan secara maksimal. Proses pengorganisasian inilah yang diduga dapat menentukan sejauh mana tugas dan tujuan program tercapai. Topik pengorganisasian program inilah yang menarik minat saya untuk meneliti, karena kalau materi pencegahan perdagangan orang, dalam hemat saya, kiranya telah tersedia pada beragam bacaan. Namun kalau proses pengorganisasian agar materi tersebut tersampaikan pada masyarakat dan kemudian mereka memiliki kesadaran untuk mencegah dan kemudian bahkan melakukan advokasi di tingkat desa, maka hal ini yang sungguh menarik untuk diteliti.

Alasan lain adalah karena sebelumnya saya telah melakukan *internship* di lembaga ini, sehingga mengetahui para pelaku di balik pelaksanaan program ini dan memiliki akses terhadap data terkait, termasuk laporan program tersebut, sehingga potensi data dan informan ini kiranya cukup untuk menulis sebuah skripsi. Di samping itu, dari sisi kemanusiaan, perdagangan orang adalah isu yang menyangkut harkat kemanusiaan, sehingga secara etis dan moral patut untuk dicegah. Maka dari itu, Mitra Wacana WRC secara tidak langsung membawa beban dan tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan program karena menyangkut perihal kemanusiaan ini. Saya menulis skripsi ini sekaligus karena terdorong untuk mendokumentasikan proses mereka dalam menginisiasi dan melaksanakan program pencegahan perdagangan orang ini sebagai bentuk apresiasi saya terhadap kerja mereka bukan hanya di dalam kantor lembaga

tetapi juga pada beragam kalangan di masyarakat. Inilah signifikansi praktis lain yang membuat topik ini pantas untuk diangkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah saya jelaskan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. **Bentuk struktur program macam apakah yang dipakai Mitra Wacana WRC dalam pengorganisasian program “Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Pendidikan Publik, Pengembangan Media dan Advokasi Kebijakan” periode Oktober 2018 – Maret 2019?**
2. **Elemen apa saja yang terlibat dalam pengorganisasian Mitra Wacana WRC dalam melaksanakan program tersebut?**
3. **Bagaimana proses sosial dalam tahapan pengorganisasian Mitra Wacana WRC dalam melaksanakan program tersebut?**
4. **Bagaimana hasil dari capaian program tersebut?**

C. Kerangka Konseptual

1. Pengorganisasian

Menurut Holt (1993), pengorganisasian adalah fungsi untuk mengumpulkan sumber daya, mengalokasikan sumber daya, dan penataan tugas dalam memenuhi rencana organisasi (Winardi, 2017, p. 20).³ Proses tersebut dapat dipahami melalui sebuah struktur yang terbentuk dalam organisasi. Pembentukan struktur organisasi juga disebut dengan proses pengorganisasian yang artinya menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan, sehingga mempunyai hubungan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Menurut Jones & May (1992), pekerja sosial dan pekerja kesejahteraan sosial perlu memahami struktur karena struktur membentuk bagaimana penyusunan tugas kerja dan tanggung jawab bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Machdum, 2013, p. 66).

³ Winardi. (2017). Teori organisasi dan pengorganisasian. Jakarta: Rajawali Press

Pada konteks ini struktur menjadi pembahasan penting dalam konsep pengorganisasian. Struktur bukan merupakan suatu hal yang kaku sebagaimana kerangka atau dinding di dalam sebuah bangunan. Bentuk dari struktur organisasi dapat dilihat melalui sebuah gambar bagan yang memperlihatkan berbagai posisi yang ada di dalam organisasi dan bagaimana posisi tersebut terkait antara satu dengan lainnya. Posisi-posisi dalam struktur memiliki tingkatan yang ditandai oleh sebuah bagan yang saling terhubung melalui suatu garis. Garis tersebut tergambar secara vertikal maupun horizontal dengan bentuk solid maupun terputus-putus.

Tingkatan dalam struktur organisasi dimulai dari level yang paling tinggi - seperti direktur, manajer, ketua-- sampai dengan level yang terbawah --seperti penanggung jawab program dan para staff bawahan. Setiap tingkatan saling terhubung antara satu dengan lainnya yang ditunjukkan melalui garis-garis penghubung antarbagan. Namun, struktur organisasi tidak bisa memberikan gambaran yang utuh mengenai pengorganisasian yang dimiliki oleh organisasi. Perlu suatu pendekatan tertentu untuk melihat lebih dalam bagaimana gambaran proses pengorganisasian yang terjadi melalui struktur organisasi. Pendekatan tersebut mencakup setiap konsep tentang proses pengorganisasian dan struktur organisasi. Sehingga, setiap kata kunci yang ada dapat dijabarkan secara detail sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini juga didukung dengan teknik pengumpulan dan triangulasi data agar data yang dihasilkan lebih akurat sebelum dianalisis.

2. Struktur Program

Struktur organisasi dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan organisasi agar lebih efektif. Tujuan organisasi ini akan menentukan struktur organisasinya, yaitu dengan menentukan seluruh tugas pekerjaan, hubungan antartugas, batas wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan masing-masing tugas tersebut. Jadi, struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan

organisasi, hubungan antar fungsi-fungsi, serta wewenang dan tanggung jawabnya.

Organisasi dilihat sebagai sesuatu yang dinamis. Struktur organisasi dilihat oleh Jones & May (1992) sebagai sebuah konsep yang terdiri dari 4 elemen dasar, yaitu: *role* (peran), *relations* (relasi), *rules* (peraturan), dan *records* (pendokumentasian). Setiap elemen tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing elemen dalam struktur organisasi di atas perlu dipahami lebih dalam dengan memaparkannya ke dalam paparan di bawah ini.

a) Peran (*Role*)

Konsep peran (*role*) atau dapat memberikan pemahaman mengenai proses kerja seseorang dalam suatu organisasi. Robbins (2001) mendefinisikan peran sebagai “*a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit*” (seperangkat pola perilaku yang diharapkan dikaitkan dengan seseorang yang menempati posisi tertentu di unit sosial) (Wimasari, 2014). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi atau kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Hubungan antara peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan karena keduanya mempunyai ketergantungan antara yang satu dengan yang lain (Soekanto, 1990, p. 268).⁴ Pada konteks ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas sesuai dengan kedudukannya dalam sebuah organisasi. Melalui peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi maka akan terbentuk suatu komponen penting, yaitu identitas dan kemampuan orang itu dalam bekerja.

b) Relasi/Hubungan (*Relation*)

Proses pengorganisasian program juga mencakup konsep relasi (*relation*) atau biasa disebut hubungan. Secara sosiologis, konsep relasi merupakan hubungan timbal-balik antara individu yang satu dengan

⁴ Soekanto. (1990). Sosiologi: Suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Press

individu yang lain dan melibatkan interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Di samping itu, relasi merupakan hasil dari rangkaian tingkah laku yang sistematis antara dua orang atau lebih yang terjadi secara teratur dan berulang-ulang dengan pola yang sama. Relasi atau hubungan dapat dilihat melalui garis-garis yang menghubungkan antarbagian dalam struktur organisasi. Pada konteks ini, tidak hanya sekedar garis yang akan kita lihat, akan tetapi juga gambaran yang terjadi melalui garis-garis penghubung antarbagian.

Untuk membantu melihat relasi yang terjadi dalam pengorganisasian program, saya tertarik untuk menggunakan suatu konsep yang ditulis oleh Jones & May (1992) yang merinci konsep relasi yang mereka bagi ke dalam beberapa komponen (Machdum, 2013, p. 76). Komponen tersebut terdiri dari: (1) kekuasaan, otoritas dan sistem yang mempengaruhi; (2) sistem pengambilan keputusan dan perencanaan; (3) pembagian kerja; (4) sistem komunikasi.

Keempat komponen di atas secara sederhana dapat dirinci melalui beberapa penjelasan singkat berikut ini. Pertama, berkaitan dengan otoritas kita paham bahwa di dalam proses pengorganisasian suatu program kita perlu menentukan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengelola personil organisasi dalam menjalankan tugasnya. Pola pemberian kewenangan pada setiap organisasi akan berbeda-beda, di samping hal itu tergantung pada kedudukan setiap personil. Kedua, pada komponen pengambilan keputusan dan perencanaan terdapat beberapa sub komponen yang terdiri dari alokasi tanggung jawab, delegasi formal, dan proses perencanaan. Ketiga, pada komponen pembagian kerja terdapat beberapa sub komponen yang terdiri dari spesialisasi, alokasi dan urutan pelaksanaan kerja. Keempat, pada komponen sistem komunikasi terdapat sub komponen pelaporan dan publikasi, pertemuan, aturan-aturan mengenai diseminasi informasi, dan manajemen sistem informasi. Keempat hal ini merupakan penjabaran singkat dari konsep relasi oleh Jones & May di atas yang dalam praktik organisasional pada umumnya ditentukan oleh aturan yang berlaku.

c) **Aturan (*Rules*)**

Aturan (*rules*) merupakan konsep yang terbentuk melalui proses sosial. Pada aturan terdapat nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁵ Nilai-nilai tersebut kemudian dituangkan ke dalam kesepakatan-kesepakatan di mana orang-orang menyepakati hal-hal baik apa saja yang dapat menjadi pandangan bersama. Melalui kesepakatan tersebut memunculkan sifat mengikat, sehingga orang harus melakukan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Maka dari itu, muncul konsep aturan yang membentuk pola-pola sikap dan tindakan yang menjadi acuan bagi individu dan masyarakat.

Pada konteks ini, aturan merujuk pada struktur organisasi yang dibentuk. Setiap organisasi memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan proses terbentuknya organisasi tersebut. Pada pembahasan ini aturan yang dibuat di dalam organisasi dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, aturan yang terkait dengan elemen relasi (peran dan hubungan) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya. Kedua, aturan yang ditujukan untuk mengelola pelayanan yang diberikan oleh organisasi. Secara lebih jelas bentuk aturan dalam organisasi dapat berupa: aturan umum, aturan spesifik, peraturan yang tertulis, peraturan internal, pengerjaan manual dan formal preseden.⁶

d) **Pendokumentasian (*Records*)**

Records atau pendokumentasian merupakan suatu hal yang penting dalam pengorganisasian. Weber dalam teori birokrasi menjelaskan bahwa pencatatan memungkinkan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya kembali isu-isu spesifik.⁷ Menyimpan catatan terperinci tentang tanggung jawab dalam suatu organisasi akan membantu menghindari segala bentuk

⁵ Soekanto. (1990). Sosiologi: Suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Press

⁶ Jones & May (dalam Machdum, 2013: 77). Pengorganisasian pemberdayaan ekonomi dan dinamika proses pelaksanaannya pada *faith based organization*. Disertasi. Universitas Indonesia

⁷ Leonade. (2019, April 1). Teori manajemen birokrasi max weber. Februari 3, 2020. <https://www.stu-di-manajemen.com/2019/04/teori-manajemen-birokrasi-max-weber.html>

kesalahpahaman diantara personil organisasi. Pada konteks ini, *records* tidak hanya sebatas pada pencatatan secara tertulis, akan tetapi berbagai bentuk pelaporan baik secara tulisan maupun pendokumentasian melalui gambar. Pelaporan merupakan sarana penting untuk mempertahankan kontrol organisasi dan sosial sekaligus cara memonitor kinerja organisasi juga untuk meningkatkan kontrol pusat, meningkatkan partisipasi demokratis dalam pengambilan keputusan.

3. Bentuk Struktur Program

Pengorganisasian tidak terlepas dari kaitannya dengan pembagian dan pengelompokan kegiatan, tugas masing-masing antar divisi, dan manajemen sumber daya manusia, serta bagaimana cara mendelegasikan tugas tersebut kepada individu atau divisi tertentu untuk menjalankannya. Di samping itu, penyusunan struktur organisasi dibutuhkan untuk memperjelas fungsi-fungsi dari masing-masing bagian dan sifat hubungan antara bagian-bagian tersebut. Melalui penyusunan berbagai macam komponen dalam organisasi tersebut maka dapat ditentukan suatu jenis bentuk dari struktur organisasi atau program. Pada konteks ini akan dijelaskan beberapa macam bentuk atau tipe organisasi yang nanti akan digunakan sebagai landasan konsep dalam penelitian ini.

Menurut Hick (1972), bentuk organisasi dapat dibedakan menjadi 2 macam atas dasar tingkat kepastian struktur, yaitu bentuk tipe organisasi formal dan informal (Winardi, 2017, p. 8).⁸ Pertama, bentuk organisasi formal dijelaskan bahwa memiliki struktur yang terumuskan dengan baik. Struktur ini menerangkan hubungan-hubungan otoritas, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran, dan melalui apa komunikasi berlangsung. Kedua, bentuk organisasi informal dijelaskan bahwa organisasi ini terorganisir secara “lepas”, bersifat fleksibel, tidak terumuskan dengan baik, dan sifatnya adalah spontan. Keanggotaan pada organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun

⁸ Winardi. (2017). Teori organisasi dan pengorganisasian. Jakarta: Rajawali Press

secara tidak sadar. Selain itu, sifat hubungan-hubungan antar anggota dan tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi.

Pada referensi lain dalam buku karangan Sutarto (2015) menjelaskan beberapa bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pucuk pimpinan dan saluran wewenang (p. 201).⁹ Organisasi ditinjau dari jumlah pucuk pimpinan memiliki bentuk tunggal dan jamak, sedangkan ditinjau dari saluran wewenang suatu organisasi memiliki 6 bentuk, yaitu (1) bentuk jalur; (2) bentuk fungsional; (3) bentuk jalur dan staff; (4) bentuk fungsional dan staff; (5) bentuk fungsional dan jalur; (6) bentuk jalur, fungsional dan staff. Berdasarkan kedua segi tersebut yang membedakan adalah adanya bentuk organisasi ditinjau dari pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab. Selain itu, dibedakan berdasarkan jumlah orang yang memegang pimpinan.

Berdasarkan kedua referensi mengenai bentuk atau tipe organisasi di atas, maka dalam penelitian ini akan menggunakan landasan konsep yang dijabarkan dalam buku karangan Sutarto. Konsep tersebut dengan membagi bentuk organisasi menjadi dua segi yang ditinjau dari jumlah pucuk pimpinan dan saluran wewenang. Saya cenderung akan menggunakan bentuk organisasi tunggal dan bentuk fungsional dan jalur karena berdasarkan pengamatan yang ditemukan di lapangan. Pada jumlah pucuk pimpinan tunggal di mana dalam sebuah organisasi yang menjadi pimpinan ada ditangan seorang. Kemudian, pada bentuk fungsional dan jalur di mana organisasi dengan wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Pimpinan tiap bidang kerja berhak memerintah kepada semua pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang kerjanya. Untuk itu, tiap-tiap satuan pelaksana ke bawah memiliki wewenang dalam semua bidang kerja.

⁹ Sutarto. (2015). Dasar-dasar organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

4. Program

Menurut Arikunto (2004), program merupakan suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Wimasari, 2014, p. 49).¹⁰ Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau negara. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang hadir untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan Pemerintah. Program-program yang mereka bentuk bertujuan salah satunya dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat umum.

Program tersebut sebelum diimplementasikan kepada masyarakat luas harus melalui beberapa tahap proses pengorganisasian. Proses tersebut harus melalui tahapan yang matang agar dapat menunjukkan tingkat efektifitas, profesionalisme dan komitmen yang kuat dari suatu organisasi dalam pembentukan program. Suatu program yang baik akan memberikan panduan efektif dalam pengelolaan sumber daya baik itu manusia, material, dan non-material. Melalui proses pengelolaan yang efektif dapat memberikan kontrol dan evaluasi pada proses berjalannya suatu program.

Setiap LSM memiliki program-program yang beragam sesuai dengan isu yang menjadi fokus perhatian. Hal ini juga dipengaruhi oleh profil lembaga, seperti visi, misi, tujuan, fungsi, struktur, bentuk lembaga, serta bidang program yang dibuat. Di samping itu, setiap LSM memiliki proses pembentukan program yang kurang lebih sama. Hal ini dapat dilihat melalui acuan yang sering digunakan sebagai dasar dari pembentukan program. Acuan tersebut, seperti menggunakan konsep 5W1H / SWOT dan pada praktiknya berpedoman dengan konsep *Participatory Action Research* (PAR) juga *Community Development*. Pada penelitian ini, subjek merupakan LSM yang

¹⁰ Wimasari, Ossa Malika. (2014). Analisis peran kepemimpinan bupati dalam pelaksanaan program one village one product (ovop) di kabupaten wonosobo, jawa tengah: studi peran kepemimpinan menggunakan teori mintzberg. Skripsi. Universitas Indonesia

bernama Mitra Wacana WRC. Saya sebelumnya pernah menjadi bagian dari Mitra Wacana WRC dan ikut berproses pada setiap kegiatan yang dilakukan. Di samping itu, saya mendapatkan pengetahuan salah satunya mengenai pembentukan program di Mitra Wacana WRC. Proses pembentukan program yang mereka lakukan menggunakan tahapan yang disebut dengan PIME (*Planning, Implementing, Monitoring, Evaluating*).

5. Tahapan Program

Saya menggunakan konsep PIME sebagai landasan dari tahapan pengorganisasian program. Konsep ini berdasarkan diskusi yang saya lakukan dengan Divisi Penelitian dan Pengembangan di Mitra Wacana WRC.¹¹ PIME merupakan akronim dari *Planning, Implementing, Monitoring, Evaluating* yang dibentuk melalui penggabungan keempat konsep tersebut. Keempat konsep tersebut memiliki landasan masing-masing yang kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan konsep yang disebut PIME. Kemudian, Mitra Wacana WRC menggunakan konsep PIME sebagai landasan dalam proses pengorganisasian program. Namun, saya akan menggunakan konsep PIME yang dijabarkan menggunakan teori yang lebih dalam lagi agar dapat menjangkau setiap data yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka dari itu, PIME harus dipaparkan lebih dalam lagi dengan menggunakan teori atau konsep yang sesuai untuk melihat proses yang terjadi. Pada sub bab di bawah ini akan dipaparkan tahapan proses pengorganisasian program dengan menggunakan konsep PIME. Terdapat 4 tahapan dalam pengorganisasian program, yaitu: (1) *Planning* (Perencanaan); (2) *Implementing* (Implementasi); (3) *Monitoring* (Pemantauan); dan (4) *Evaluating* (Evaluasi).

a) Perencanaan (*Planning*)

Planning atau perencanaan merupakan upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi dan bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian

¹¹ Putra, Bintang A. (2018, October 12). Catatan harian *internship* di mitra wacana wrc

rumusan rencana kegiatan tertentu. Menurut Siagian (1982), perencanaan adalah seluruh proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan (p. 54).¹² Perencanaan merupakan fungsi organik pertama dari administrasi dan manajemen, alasannya adalah tanpa adanya rencana mereka tidak memiliki dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka pencapaian tujuan. Perencanaan sebagai fungsi organik manajemen merupakan perumusan yang penting daripada kebijaksanaan mengenai berbagai aspek serta kegiatan, termasuk sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Perencanaan sangat berpengaruh terhadap terwujudnya efektivitas organisasi. Handoko (1989) memaparkan efektivitas dari perencanaan dapat dipahami melalui kriteria-kriteria penilaian sebagai berikut:¹³

Kegunaan

Suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain. Fleksibilitas adalah esensi bagi kesuksesan perencanaan strategis. Hal ini memerlukan analisis, peramalan, pengembangan rencana dengan mempertimbangkan segala sesuatu dan pembuatan perencanaan sebagai proses yang berkesinambungan. Rencana hendaknya dapat melakukan penyesuaian secara cepat dan lancar terhadap perubahan kondisi lingkungan tanpa kehilangan efektivitas.

Rencana juga memerlukan stabilitas, karena bila rencana terlalu sering berubah akan menjadi tidak efektif. Rencana tidak perlu harus diubah atau dimodifikasi secara luas hanya karena adanya perubahan-perubahan lingkungan. Sifat keberlanjutan juga diperlukan agar perencanaan dapat berkesinambungan. Di samping itu, perencanaan dibuat sederhana karena

¹² Siagian, Sondang P. (1982). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara

¹³ Endrizal. (2010). Pengaruh perencanaan dan pengorganisasian terhadap implementasi program dan kegiatan di lingkungan mahkamah konstitusi. Tesis. Universitas Indonesia

semakin kompleks rencana akan semakin sulit untuk disampaikan dan diimplementasikan.

Ketepatan dan Objektivitas

Rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen akan efektif jika didasarkan atas informasi yang tepat. Perencanaan juga harus lebih didasarkan atas pemikiran yang realistis dan fakta-fakta yang sebenarnya tentang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dibanding sasaran pribadi pembuat rencana. Pemikiran yang objektif menjadi dasar untuk proses penyusunan agar perencanaan tersebut dapat tercapai.

Efektivitas Biaya

Efektivitas biaya perencanaan dalam hal ini adalah menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional. Salah satu pedoman penting dalam perencanaan adalah jangan lakukan perencanaan jika hasil-hasil meningkatkan penghasilan atau mengurangi biaya lebih kecil dari pada biaya perencanaan dan implementasinya.

Akuntabilitas

Terdapat dua aspek akuntabilitas perencanaan: (1) tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan; dan (2) tanggung jawab atas implementasi rencana. Suatu rencana harus mencakup keduanya.

Ketepatan Waktu

Para perencana harus membuat berbagai perencanaan. Berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat yang dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

b) Implementasi (*Implementing*)

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2004), adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak atau akibat

terhadap sesuatu (Sinulingga, 2014, p. 12).¹⁴ Sebuah program merupakan sarana untuk mendorong suatu kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan. Program merupakan unsur penting demi tercapainya kegiatan implementasi. Implementasi program merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau kelompok terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

Implementasi program dapat berjalan dengan efektif tergantung dari unsur pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan selama proses implementasi. Menurut Edward III (1980), terdapat 4 elemen yang mempengaruhi efektifitas implementasi suatu program, yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur birokrasi (Mauludi, 2014, p. 30).¹⁵ Keempat elemen tersebut saling berinteraksi dan saling berpengaruh, sehingga pemahaman mengenai implementasi program dapat diperoleh secara luas. Elemen-elemen tersebut dipaparkan sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari para personil yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang

¹⁴ Sinulingga, Rosina. (2014). Implementasi program bantuan siswa miskin bagi siswa sma negeri di kota binjai. Tesis. Universitas Medan Area

¹⁵ Mauludi, Andhika. (2014). Analisis implementasi program pelayanan internal manunggal satu atap one desk service di kementerian luar negeri. Skripsi. Universitas Indonesia

telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi, dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan atau bagaimana hubungan yang dilakukan.

Sumber Daya

Sasaran, tujuan dan isi program meskipun telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tidak akan berjalan efektif dan efisien jika implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan. Maka dari itu, sumber daya penting dalam proses implementasi. Pada konteks ini, sumber daya dibagi menjadi 4 komponen, yaitu sumber daya manusia, informasi, kewenangan, sarana dan prasarana, serta pendanaan.

Disposisi

Disposisi merupakan sikap dan komitmen dari pelaksana program. Hal ini berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan program tersebut. Kecakapan yang dimiliki tidak akan cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan program. Disposisi membentuk konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil dan pelaksana program. Pelaksana program apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat program, maka implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

Struktur Birokrasi

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatan dan garis-garis antara berbagai posisi yang dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang ditetapkan. Peta organisasi bersifat hierarkis yang menentukan hubungan antar atasan dan bawahan serta hubungan diagonal langsung organisasi. Struktur organisasi mempunyai peranan penting dalam implementasi program. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedure/SOP*). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

c) Pemantauan (*Monitoring*) dan Evaluasi (*Evaluating*)

Menurut Ojha (1998), *monitoring* dan evaluasi merupakan dua tahap yang saling terikat satu sama lain. Kedua konsep tersebut merupakan sebuah proses yang berkesinambungan meliputi pengumpulan data, proses dan pemilihan informasi mengenai implementasi program, kemajuan yang dicapai pada program tersebut sampai kepada dampak dan efek dari adanya program tersebut.¹⁶

Pemantauan atau *monitoring* merupakan proses berkelanjutan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi mengenai apa yang telah direncanakan dalam sebuah proyek atau program, termasuk di dalamnya adalah asumsi-asumsi atau faktor-faktor eksternal dan efek samping dari terlaksananya proyek tersebut, baik itu positif maupun negatif (Ojha, 1998).¹⁷ *Monitoring* lebih ditekankan untuk menilai apakah sumber proyek (*input*) akan dilaksanakan dan digunakan dalam menghasilkan luaran (*output*) yang dituju. Sedangkan, evaluasi dilakukan untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, membantu perencanaan, menyesuaikan program, dan pengambilan keputusan selanjutnya. Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk perbaikan tercapainya keberhasilan suatu kegiatan, pengusulan atau seleksi, kegiatan dan penilaian keberhasilan kegiatan.

Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan *monitoring*. Hal ini karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan *monitoring*. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Di samping itu, berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai dan memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan serta dapat menjawab pertanyaan seperti apa perbedaan yang dibuat. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau

¹⁶ Ojha, Durga. (1998). *Impact monitoring approaches and indicators*. GTZ: Escborn

¹⁷ Ojha, Durga. (1998). *Impact monitoring approaches and indicators*. GTZ: Escborn

tidak dan lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan) sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan lalu dilaksanakan.

Menurut Ojha (1998), terdapat 5 elemen *monitoring* dan evaluasi yang baik, yaitu:¹⁸

- Memiliki tujuan yang jelas yang ditunjukkan dengan adanya indikator yang jelas pula
- Disusun oleh indikator-indikator yang meliputi *input*, *process*, *output* dan *impact*
- Memiliki teknik pengumpulan data dan manajemen data yang mampu dijelaskan dan dijustifikasi
- Bertujuan untuk mengatur sistem institusional dan pembangunan kapasitas
- Memasukkan *monitoring* dan evaluasi ke dalam manajemen program.

Monitoring dan evaluasi merupakan tahap terakhir dari proses tahapan pengorganisasian program. Hal ini dilakukan setelah proses *planning* dan *Implementing*. Pada konsep ini, *monitoring* dan evaluasi didasarkan pada tujuan yang bermanfaat dalam melihat kembali (*feedback*) mengenai sejauh mana program ataupun sebuah kegiatan telah berjalan.

6. Capaian Program

Capaian program merupakan hasil dari serangkaian kegiatan yang telah tersusun dan terlaksana hingga suatu program selesai dijalankan. Capaian program digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi atau lembaga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Capaian program dievaluasi dengan menggunakan berbagai indikator program yang telah ditetapkan dalam perencanaan program. Hal ini disertai dengan tingkat capaian yang tertera dalam penetapan indikator program yang terdiri dari indikator *input* dan *output*.

¹⁸ Ojha, Durga. (1998). *Impact monitoring approaches and indicators*. GTZ: Esborn

Ketercapaian program dapat dinilai dengan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap indikator yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengamatan saya, indikator-indikator tersebut memiliki beberapa aspek, seperti pelaku, wujud, waktu, dan proses/cara. Keseluruhan aspek tersebut dapat dicakup dengan menggunakan satu cara, yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif memungkinkan untuk menganalisis aspek-aspek pada indikator secara menyeluruh, sehingga hasil ketercapaian program dapat dinilai dan dilihat.

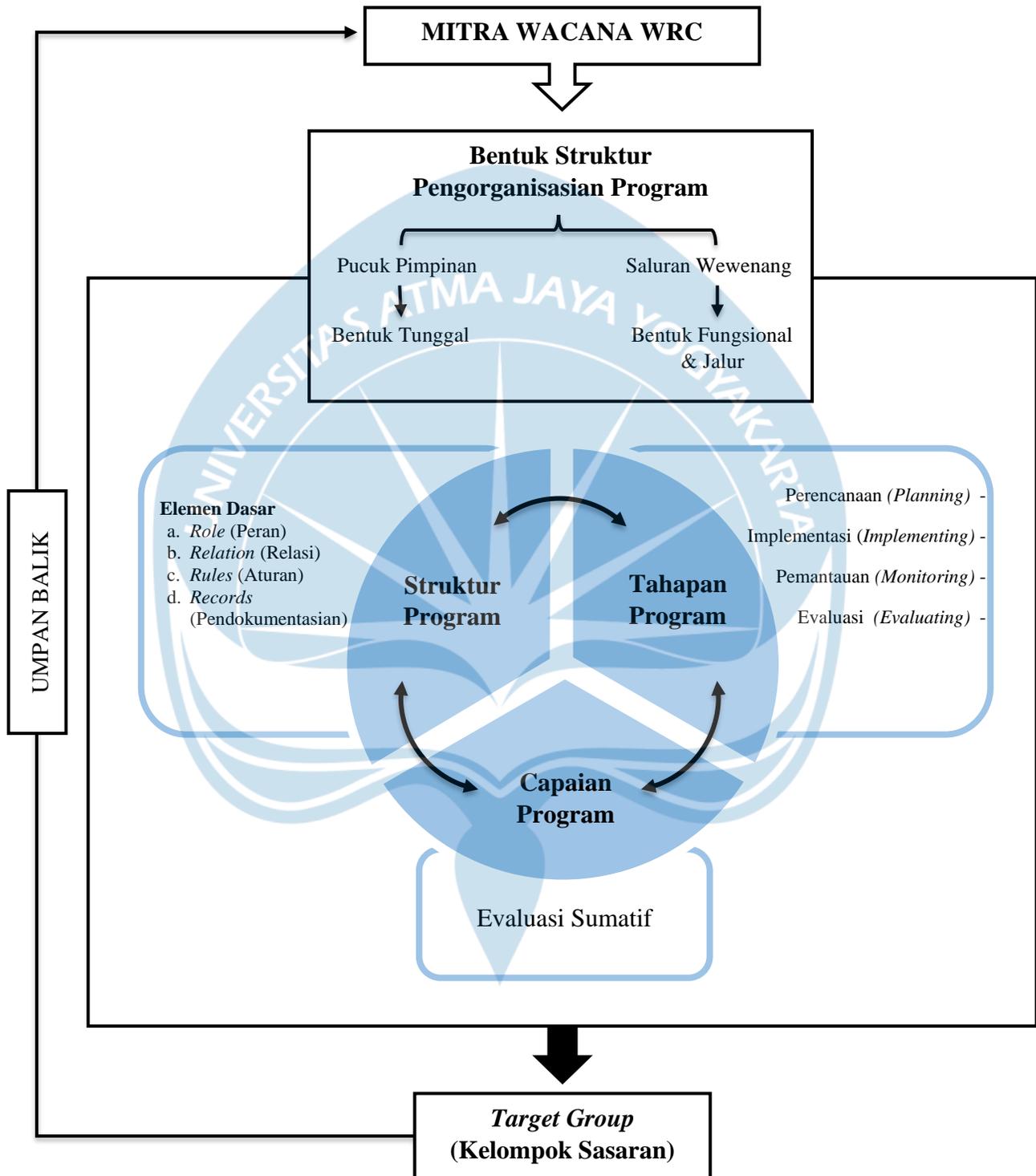
Pada konteks ini landasan konsep yang digunakan dengan meminjam istilah dari metode penelitian survei, yaitu menggunakan jenis evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif merupakan usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu (Dunn, 2003, p. 604).¹⁹ Di samping itu, Patton (2002) menjelaskan bahwa evaluasi sumatif digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan, program, atau produk dengan menyampaikan apakah kegiatan yang dievaluasi sudah atau belum berjalan efektif (Permana, 2012, p. 28).²⁰ Di samping itu, evaluasi dilakukan di akhir program untuk memastikan bahwa program yang dijalankan berhasil atau gagal menurut tujuan program.

Penilaian seperti ini diperlukan untuk memastikan bahwa jika program yang sama diterapkan di tempat lain yang konteksnya relatif sama maka akan diperoleh tingkat keberhasilan yang sama pula. Oleh sebab itu, dalam evaluasi sumatif, penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap indikator perencanaan dan variabel tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap akhir capaian program untuk melihat hasil yang dituju berkaitan dengan *output*, seperti barang atau jasa yang dihasilkan oleh program, kebijakan, atau proyek. Di samping itu, sasaran bisa juga termasuk dalam *outcomes*, yaitu pengaruh pada partisipan atau kelompok sasaran.

¹⁹ Dunn, William N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

²⁰ Permana, Yogie. (2012). Evaluasi sumatif terhadap pemenuhan hak dasar anak jalanan dalam program kesejahteraan sosial anak jalanan (pks-anjal): Studi kasus di yayasan uswatun hasanah. Skripsi. Universitas Indonesia

D. Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir pada lembar sebaliknya, bahwa penelitian ini ingin menunjukkan logika berpikir yang akan digunakan. Pada bagan paling atas merupakan lembaga yang bekerjasama dengan pihak *funding* dan memiliki program untuk dijalankan. Lembaga merupakan subjek atau pelaku pengorganisasian program, sedangkan program sebagai aktivitas yang dikerjakan oleh subjek tersebut, yang sekaligus menjadi fokus penelitian ini. Sebagai serangkaian aktivitas, program tersebut akan dilihat menggunakan perspektif proses pengorganisasian sebagaimana telah ditunjukkan pada bagan pengorganisasian di atas yang melingkupi rangkaian konsep yang merupakan dimensi dari suatu teori.

Bagaimanakah bentuk dari suatu struktur pengorganisasian program? Konsep ini akan ditinjau dari dua elemen yang membentuknya, yaitu pucuk pimpinan dan saluran wewenang. Hal ini untuk menentukan jenis bentuk organisasi yang digunakan oleh lembaga. Struktur ini akan menjadi subjek yang menjalankan proses pengorganisasian program untuk mencapai tujuan tertentu yang bisa dirasakan dampaknya oleh kelompok sasaran.

Proses pengorganisasian program dilakukan dengan menjalankan ketiga komponen di dalamnya, yaitu struktur, tahapan dan capaian program. Komponen yang pertama, yaitu struktur program, memiliki empat elemen dasar, yaitu relasi, peran, aturan dan pendokumentasian yang digunakan untuk melihat elemen dalam proses pengorganisasian program.

Proses pengorganisasian program berdasarkan struktur di atas hendak dilakukan melalui tahapan tertentu. Sebagaimana umumnya banyak organisasi telah melakukannya, hal ini juga dilakukan melalui 4 tahap pengorganisasian suatu program, yaitu perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Proses yang dilakukan melalui tahap-tahap pengorganisasian program seperti ini ditujukan untuk mencapai hasil program tertentu (baca: capaian program).

Capaian program hanya bisa diketahui kalau para aktor yang melakukan pengorganisasian program melakukan suatu evaluasi. Meminjam apa yang biasanya dilakukan pada studi survei, evaluasi ini ada yang dilakukan di dalam proses pelaksanaan program dan ada pula yang dilakukan pada akhir pelaksanaan program. Kerangka berpikir ini akan menggunakan konsep evaluasi sumatif untuk

menggambarkan apa yang dievaluasi oleh para pelaku pada akhir tahapan program: tercapai seperti yang direncanakan, atau tidak. Evaluasi ini dipilih karena program ini telah selesai dilakukan oleh Mitra Wacana WRC dan telah diketahui hasil akhir capaian program yang mereka organisir, sehingga evaluasi sumatif lebih cocok untuk dipilih. Hal ini tentu akan berbeda dengan penelitian yang dilakukan ketika program masih berlangsung dan pengorganisasian program tentu saja masih dilakukan, sehingga evaluasi di dalam pelaksanaan program lebih tepat untuk dianalisis dan apakah perannya dalam memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan atau aktivitas ke depan agar capaian program keseluruhan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Oleh sebab itu, elemen dari capaian program sebagaimana terbaca pada Kerangka Berpikir adalah Evaluasi Sumatif, evaluasi terhadap keseluruhan proses dan capaian pengorganisasian program.

Capaian program tersebut mengarah pada kelompok sasaran (*target groups*) yang menjadi penerima manfaat pengorganisasian program. Terdapat konteks lokasi operasional program, yaitu konteks geografis dan demografis di mana *target groups* berdomisili dan konteks organisasional program, yaitu pelaksana program (baca: Mitra Wacana WRC) secara organisasional harus mempertanggungjawabkan program pencegahan perdagangan orang ini kepada lembaga *funding* yang memberikan pendanaan. Mengenai kedua hal ini, tentu saja Mitra Wacana WRC akan meminta pertanggungjawaban dari pelaksana lapangan yang mengorganisir berjalannya program ini untuk kemudian melalui mekanisme internasional mereka akan memrosesnya sebelum menyampaikan laporan ke lembaga donor. Keberhasilan mereka tergantung pada *outputs* dan *outcomes* yang dirasakan oleh kelompok sasaran, sehingga umpan balik dari kelompok ini menjadi penting bagi Mitra Wacana WRC dalam melaporkan capaian program ini kepada lembaga *funding*.

Oleh sebab itu, kelompok sasaran (*target groups*) penting posisinya untuk mengetahui apakah program sungguh memberdayakan mereka dalam menyadari dan tergerak untuk turut mencegah perdagangan orang dan bahkan melakukan advokasi pada tingkat desa atau tidak. Capaian program yang dirasakan oleh *target groups* ini akan menjadi umpan balik bagi Mitra Wacana WRC, kemudian akan menjadi bahan untuk menyusun laporan kepada lembaga *funding*. Oleh sebab itu, capaian program

bukan hanya berkaitan dengan pengorganisasian internal Mitra Wacana WRC dan para *stakeholder* yang terlibat, tetapi juga berkaitan dengan apa yang diterima dan dirasakan oleh kelompok sasaran. Untuk menentukan hasil dari capaian program ini, sebagaimana telah disampaikan di muka, saya akan menggunakan jenis evaluasi yang dipinjam dari metode penelitian survei, yaitu evaluasi sumatif. Pada titik ini kelompok sasaran juga akan menjadi pihak yang menentukan hasil yang dicapai oleh pengorganisasian program pencegahan perdagangan orang ini berdasarkan apa yang mereka rasakan dan terima (penerima manfaat, *beneficiaries*) dari program ini. Umpan balik kelompok sasaran ini menjadi “wajah” capaian program yang diorganisir Mitra Wacana WRC di “mata” kelompok sasaran, dalam hal ini P3A dan Kelompok Media Desa di lokasi penelitian.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah saya rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk struktur program yang dipakai Mitra Wacana WRC dalam pengorganisasian program “Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Pendidikan Publik, Pengembangan Media dan Advokasi Kebijakan” periode Oktober 2018 – Maret 2019
2. Mengetahui elemen yang terdapat pada pengorganisasian Mitra Wacana WRC dalam pelaksanaan program tersebut
3. Mengetahui proses sosial dalam tahapan pengorganisasian Mitra Wacana WRC dalam melakukan program tersebut
4. Mengetahui hasil capaian pada program tersebut

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini, saya akan menjabarkan alur penulisan skripsi yang terdiri dari 4 bab. Tiap bab tersebut berisikan deskripsi bahasan utama, yaitu:

1. BAB 1 – PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian yang membahas mengenai pengorganisasian program pencegahan perdagangan orang pada Mitra Wacana WRC, rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian, kerangka

konseptual yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian, dan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan

2. BAB 2 - METODOLOGI DAN DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN

Bab ini terdiri dari metode penelitian, jenis penelitian, deskripsi informan, operasionalisasi konsep, metode pengumpulan data, jenis data, cara analisis data, dan deskripsi subjek penelitian tentang gambaran umum mengenai Mitra Wacana WRC, serta penjelasan mengenai program pencegahan perdagangan orang

3. BAB 3 - TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjabaran hasil temuan dari proses pengumpulan data dan pembahasan yang dikaitkan dengan kajian pustaka, konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian

4. BAB 4 – KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil jawaban pertanyaan penelitian, dan inti pembahasan dari Bab 3.

